

BAB 2

Aktor-Aktor Dibalik Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok

Maulana Ibrahim & Poppy Wulandari

A. Mengungkap Aktor dan Kepentingan di Balik Rivalitas AS–Tiongkok

Kajian Indo-Pasifik merupakan fondasi bagi aktor internasional maupun akademisi dalam mentransformasikan pemahaman global sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan kelahiran sebuah kebijakan. Indo-Pasifik merupakan kawasan strategis dan dinamis yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi global secara masif. Kawasan ini mencakup sebagian besar wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Oseania. Secara geografis, Samudra Hindia dan Pasifik menjadi dasar pertimbangan istilah Indo-Pasifik dalam geostrategi (Zeng & Zhang, 2021). Adapun tiga aktor utama dalam dinamika Indo-Pasifik, yakni Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan

M. Ibrahim & P. Wulandari

Universitas Negeri Medan, *e-mail*: maulanaibrahim@unimed.ac.id

© 2026 Editor & Penulis

Ibrahim, M. & Wulandari, P. (2026). *Aktor-Aktor Dibalik Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok*. Dalam RR. E. Yustiningrum & E. S. Prihatini (Ed.), *Indonesia dalam Kancah Geopolitik di Indo-Pasifik* (29–69). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.2075.c1719
E-ISBN: 978-602-6303-98-1

India (He & Li, 2020). Pergeseran kiblat kekuatan ekonomi global dari Barat ke Timur, terkhusus akibat dari pengaruh Tiongkok dan India turut memengaruhi tatanan perekonomian internasional (Sudan, 2022). Kebangkitan perekonomian wilayah Timur menempatkan Indo-Pasifik sebagai kawasan strategis dan potensial.

Di Indonesia sendiri, gagasan Indo-Pasifik mulanya termuat dalam kebijakan luar negeri Indonesia pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2013 (Yustiningrum et al., 2024). Dalam gagasan Indo-Pasifik juga termuat konsep *dynamic equilibrium*, yang dapat didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi secara terus-menerus di kawasan Asia Tenggara tidak boleh mengarah pada anarki sebagai akibat dari kekuatan negara adikuasa (Anwar, 2023). Indo-Pasifik saat ini bagai podium dan pusat perhatian internasional sebagai akibat dari pergeseran kekuatan ekonomi Barat ke Timur. Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Indo-Pasifik melalui kepemimpinan Presiden Jokowi turut menguatkan program-program pendukung dalam mencapai tujuan strategis pemanfaatan peluang ekonomi di Indo-Pasifik. Meskipun Indonesia bukanlah aktor sentral dalam dinamika Indo-Pasifik, tetapi visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) merupakan bentuk sambutan hangat terhadap kesediaan untuk terlibat dalam kemajuan infrastruktur maritim dan penguatan konektivitas global (Radjendra et al., 2022).

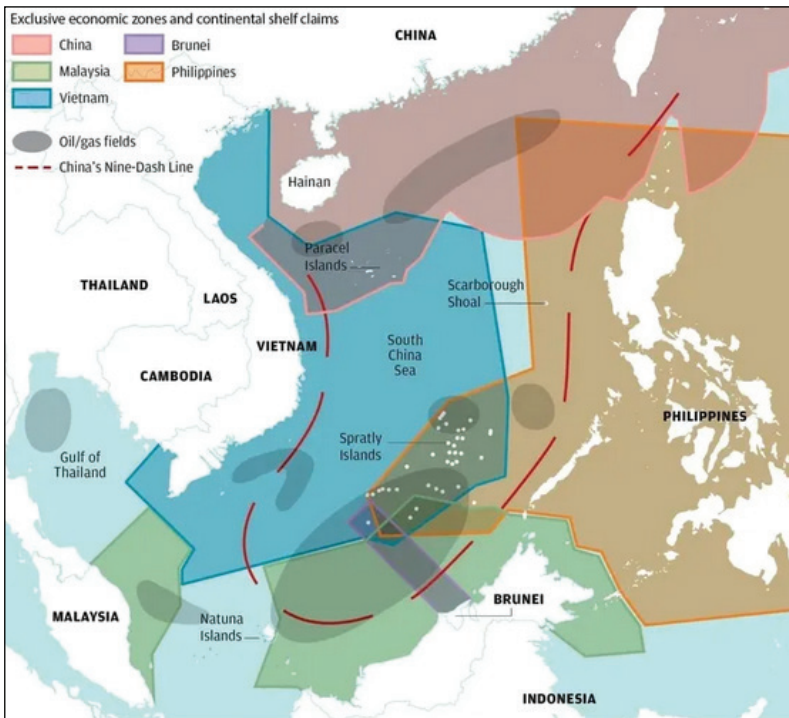
Tiongkok dan India sebagai dua aktor inti kekuatan ekonomi Timur masing-masing memiliki pengaruh signifikan di Indo-Pasifik. Tiongkok dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi pesat berdiplomasi melalui *Belt and Road Initiative* (BRI), yakni inisiatif pembangunan global yang berfokus pada kerja sama dan penguatan konektivitas negara-negara di dunia (Pedrason, 2021). Inisiatif Tiongkok melalui BRI turut membawa investasi bagi kawasan Indo-Pasifik. Investasi yang menysasar negara-negara kawasan Indo-Pasifik pada akhirnya turut mendorong perekonomian berbagai negara dan menguatkan konektivitas global. Namun, di sisi lain, inisiatif ini turut menimbulkan kekhawatiran khususnya terkait utang luar negeri dan ketergantungan ekonomi negara-negara penerima investasi.

Sementara itu, India dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil berdiplomasi melalui penguatan *soft power* sebagai diplomasi pada bidang budaya dan pendidikan. *Soft power* merupakan strategi India dalam memengaruhi negara lain melalui daya tarik budaya tanpa keterlibatan kekuatan militer atau keterpaksaan (Ohnesorge, 2020).

Dalam dinamika Indo-Pasifik, ketegangan sering kali berpusat pada Laut China Selatan (LCS). Klaim teritorial dari Tiongkok yang luas memicu konflik dengan negara-negara yang memiliki kesatuan bentangan laut, seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Situasi LCS yang sensitif ini menjadi peluang bagi AS dalam berdiplomasi melalui *Quadrilateral Security Dialogue* (Quad). Quad merupakan sebuah forum strategis yang bersifat informal dengan keterlibatan AS, Jepang, India, dan Australia yang berfokus pada keamanan maritim, perlawanan terorisme, dan penanggulangan bencana (Gale & Shearer, 2022). Misi utama Quad adalah menyeimbangkan pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik (Jash, 2021). Quad secara strategis menentang klaim teritorial Tiongkok atas LCS yang berlebihan dan memastikan perairan internasional terbuka untuk semua negara. Melalui kekuatan militer dan aliansi strategis di kawasan LCS, Quad berupaya menjaga *status quo* dan mencegah Tiongkok berlaku agresif (Zhang, 2022).

Klaim teritorial terhadap LCS hingga saat ini masih menjadi sengketa dikarenakan masing-masing negara yang berperairan di LCS memiliki dasar klaimnya sendiri hingga mengakibatkan pola laut yang tumpang tindih terhadap negara-negara tetangga. Adapun yang mendasari sengketa LCS dikarenakan terdapat kurang lebih 250 fitur objek potensial yang dibagi dalam lima grup objek utama, seperti Kepulauan Spratley, Kepulauan Paracel, Scarborough Shoal, Pulau Paratas, dan Macclesfield Bank (Zhou et al., 2020). Munculnya konflik di wilayah LCS bermula ketika Tiongkok mendaftarkan peta teritorialnya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2009, yang mana peta tersebut berlandaskan atas peta tahun 1947 milik Tiongkok (Kim & Druckman, 2020). Peta tersebut merupakan peta yang dibuat Tiongkok atas perairannya sendiri. Pembuatan peta didasarkan pada sejarah zona penangkapan ikan tradisional

(*traditional fishing*). Peta yang mulanya berjudul *Map of South China Sea Islands* tahun 1947 memiliki sembilan tanda hubung garis (*nine dash line*) menggambarkan sebagian besar wilayah LCS. Peta yang selanjutnya disebut *nine dash line* kemudian didaftarkan ke PBB pada tahun 2009 (Handiriono et al., 2024). Meskipun peta tersebut memang milik Tiongkok sejak 1947, tetapi peta tersebut belum diakui secara sah oleh internasional. Ketegangan negara-negara berperairan LCS terjadi akibat masing-masing negara memiliki klaim masing-masing dan Tiongkok justru mendaftarkan petanya kepada PBB.



Keterangan: Peta wilayah Laut China Selatan. Perbedaan warna merupakan klaim masing-masing negara, sembilan garis merah putus-putus merupakan nine dash line yang menjadi klaim Tiongkok atas teritorialnya.

Sumber: Asia Maritime Transparency Initiative (2022)

Gambar 2.1 Peta teritorial LCS yang tumpang tindih dan *nine dash line*.

Berdasarkan Gambar 2.1 tersebut, Tiongkok menuntut pengakuan bahwa wilayah dalam sembilan garis merah merupakan wilayah perairan Tiongkok. Peta tersebut mengklaim kekuasaan sekitar 90% terhadap perairan LCS (Napang et al., 2019). *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 sebagai pedoman hukum laut internasional, peta teritorial Tiongkok tidak dapat dianggap sah karena bertolak belakang dengan beberapa aturan terkait. Pasal 2 UNCLOS 1982 tentang *legal status of the territorial sea, of the air space over the territorial sea and its bed and subsoil* berbunyi:

“The sovereignty of a Coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea.” (UN, 1982).

Pasal 2 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa kedaulatan perairan suatu negara yang meluas melampaui wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dan dalam hal suatu negara kepulauan maka perairan kepulauannya sampai ke jalur laut yang berdekatan merupakan laut teritorial. Hal ini juga dikuatkan oleh hukum perihail jarak laut teritorial sejauh 12 *nautical miles* dari garis pangkal sesuai dengan pasal 3 tentang *breadth of the territorial sea* yang berbunyi:

“Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention.” (UN, 1982).

Dalam dinamika Indo-Pasifik khususnya terkait konflik LCS, ketegangan bukan hanya terjadi akibat peta *nine dash line* oleh Tiongkok, tetapi juga ketidakselarasan negara-negara dalam pengukuran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Berdasarkan Pasal 57 UNCLOS 1982 tentang *breadth of the exclusive economic zone* mengatur bahwa ZEE memiliki batas maksimal 200 mil dari garis pangkal lebar laut teritorial diukur. Konflik kepentingan antara negara-negara yang terlibat dalam konflik LCS turut menghasilkan integrasi pendekatan

antara *hard power* dan *soft power*. Integrasi kedua pendekatan ini diaplikasikan dalam kebijakan dari negara-negara yang berkonflik.

Jauh sebelum terjadi integrasi pendekatan *hard power* dan *soft power*, Filipina sebenarnya telah lebih dulu membawa sengketa terkait klaim *nine dash line* ke *Permanent Court of Arbitration* (PCA) pada 2013. Kemudian pada 2016 PCA menyatakan klaim Tiongkok terhadap *nine dash line* menyalahi aturan UNCLOS 1982. Namun, pihak Tiongkok hingga saat ini tidak mengakui keputusan PCA tersebut dan masih mempertahankan klaimnya. Pada akhirnya, klaim atas objek-objek di kawasan LCS menjadi sengketa yang penuh dinamika di kawasan Indo-Pasifik. Masing-masing negara bersengketa demi mempertahankan hak kedaulatan tentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda hingga melahirkan dinamika baru dalam Indo-Pasifik. Adapun dinamika Indo-Pasifik yang muncul sebagai dampak dari konflik LCS dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Dinamika Indo-Pasifik dan Dampak Konflik Laut China Selatan

Dinamika	Keterlibatan	Dampak
Peta tumpang tindih atas klaim teritorial di LCS	Tiongkok, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam	Ketegangan antarnegara yang berpotensi terhadap konflik militer dan ketidakpastian politik
Pembangunan pangkalan militer oleh negara-negara dengan klaim negara tumpang tindih	Tiongkok, Vietnam, Filipina	Berisiko eskalasi konflik militer dan perubahan dinamika keamanan wilayah
Arbitrase internasional	Tiongkok dan Filipina	Tiongkok menolak putusan arbitrase internasional yang mendukung Filipina pada 2016 mengakibatkan ketegangan dua negara

Dinamika	Keterlibatan	Dampak
Penguatan kemitraan dan pembentukan aliansi untuk mempertahankan posisi dalam sengketa	Negara-negara ASEAN, AS, Jepang, India	Latihan militer gabungan dan pembentukan aliansi strategis dan penguatan diplomasi melalui kemitraan untuk mengurangi ketegangan
Keterlibatan negara-negara ekonomi maju sebagai penyeimbang kekuatan Tiongkok	AS, India	Memberikan pengaruh dalam politik dan ekonomi guna menyeimbangkan kekuatan Tiongkok

Sumber: Leddy (2021); Hendler & Motta (2021); Wiegand & Beuck (2020); Kipgen (2020); Mukherjee (2020)

Ditinjau dari dinamika yang terjadi sebagai akibat dari konflik LCS, masing-masing negara yang terlibat berupaya membangun pertahanan dan strateginya masing-masing. Ada negara yang berusaha menguatkan strateginya secara mandiri melalui pengajuan ke pengadilan internasional, ada pula negara yang bersekutu dengan negara lain untuk menyeimbangkan kekuatan dan mengintegrasikan pendekatan *hard power* dan *soft power*. LCS sebagai kawasan strategis *sea line of communication* (SLOC) menghubungkan rute perairan antarpelabuhan sebagai jalur perdagangan, logistik, dan militer (Agastia & Perwita, 2016). Mengingat posisinya yang strategis, dalam keadaan darurat perang militer antarnegara maka jalur SLOC akan ditutup (Santoso, 2021). LCS merupakan jalur perdagangan perekonomian yang menguasai sepertiga arus perdagangan dunia dengan penghasilan perdagangan global senilai US\$ 3,37 triliun setiap tahunnya (Gul et al., 2022). Dalam dinamika geoekonomi, negara yang dapat menguasai wilayah strategis LCS dapat mengatur kegiatan yang menguntungkan bagi kepentingan nasionalnya.

Dinamika yang terjadi di Indo-Pasifik khususnya akibat dari ketegangan LCS bukan hanya dirasakan oleh negara-negara yang berperairan sama dan memiliki kepentingan teritorial, tetapi juga terdapat negara luar yang berusaha terlibat. Keterlibatan AS yang

bermula dari keinginannya untuk menyeimbangi kekuatan Tiongkok menambah luas dinamika yang terjadi di Indo-Pasifik (Nagy, 2022). Bahkan, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menganggap keterlibatan AS sebagai ancaman bagi perdamaian negara-negara kawasan (Santoso, 2021). Rivalitas AS dan Tiongkok memengaruhi berbagai sektor yang kemudian hal ini menjadi aspek dasar rivalitas kedua negara tersebut. Jika dirincikan lebih detail, beberapa penyebab rivalitas AS dan Tiongkok umumnya berangkat dari aspek ekonomi, militer, teknologi, politik, dan diplomasi yang dirincikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Analisis Penyebab Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok

Aspek Rivalitas	Penyebab	Analisis
Ekonomi	Persaingan ekonomi dan perang dagang	Kedua negara adikuasa bersaing untuk menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan menetapkan kebijakan perdagangan yang melindungi industri masing-masing, tetapi merugikan bagi lawan.
Militer	Dominasi militer dan keterlibatannya di Indo-Pasifik	Kedua negara saling memperkuat militer guna memperluas pengaruhnya di Indo-Pasifik.
Teknologi	Persaingan kemajuan teknologi dan inovasi	Kedua negara berkompetisi menjadi pengembang teknologi canggih, seperti 5G, <i>artificial intelligence</i> (AI), hingga semikonduktor.
Politik dan ideologi	Perbedaan pandangan politik dan benturan ideologi	AS sebagai negara yang mengedepankan demokrasi bertolak belakang dengan Tiongkok yang berideologi komunis.
Diplomasi dan aliansi	Pembentukan aliansi strategis	AS hadir sebagai sekutu negara-negara kawasan Indo-Pasifik dalam menghadapi kekuatan Tiongkok, sedangkan Tiongkok memperluas pengaruh dan diplomasi melalui BRI.

Aspek Rivalitas	Penyebab	Analisis
Isu regional	Konflik regional Taiwan dan Korea Utara	AS mempersamai Taiwan terhadap dukungan Tiongkok kepada Korea Utara yang semakin menambah dinamika di Indo-Pasifik.

Sumber: Kroenig (2020); Mearsheimer (2022).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penyebab utama yang mendasari konflik hingga bermuara pada rivalitas AS-Tiongkok adalah perbedaan ideologi, persaingan ekonomi yang ketat, dominasi kemajuan teknologi dan keamanan nasional, modernisasi militer, hingga diplomasi dan aliansi masing-masing negara. Perbedaan ideologi mulanya memunculkan kewaspadaan yang tinggi terhadap masing-masing negara, sementara persaingan ekonomi melalui perang dagang dan kompetisi dalam teknologi inovasi semakin membuat kedua negara bersitegang.

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (*literature review*). Pendekatan ini dipilih guna memberikan pemahaman mendalam mengenai rivalitas AS-Tiongkok melalui analisis kritis terhadap peran aktor-aktor dibalik ketegangan AS dan Tiongkok. Dengan demikian, tingkat analisa (*level of analysis*) dalam kajian ini adalah sekumpulan sudut pandang aktor-aktor rivalitas AS-Tiongkok yang meliputi aktor pendukung dan aktor netral dalam lingkup internasional.

Adapun yang menjadi sumber kajian dalam tulisan ini, yakni jurnal akademik, buku, laporan kebijakan, dan peraturan internasional. Proses pengumpulan data melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan seleksi literatur yang relevan dengan menggunakan basis data akademik, seperti JSTOR, Google Scholar, dan ProQuest. Kriteria seleksi meliputi kebaruan publikasi lima tahun terakhir dan fokus pada topik yang relevan dengan kajian. Guna memastikan validitas dan reliabilitas hasil, dilakukan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur dan meninjau konsistensi argumentasi yang disampaikan.

Kerangka pemikiran dalam kajian ini melibatkan analisis dinamika kekuasaan global, yang mana kedua negara bersaing untuk mendominasi dalam ekonomi, teknologi, dan militer (Wu, 2020). Rivalitas yang terjadi antara AS dan Tiongkok turut mendorong negara-negara untuk menunjukkan keberpihakan terhadap dua kekuatan negara. Pada akhirnya, negara-negara yang terlibat juga turut menjadi aktor pendukung dalam keberlanjutan rivalitas tersebut hingga saat ini.

B. Pandangan 'Amerika yang Utama'

Kawasan Indo-Pasifik sebagai penguasa sepertiga perdagangan global melalui LCS memiliki aktor-aktor dan penggerak gagasan dalam dinamika global. AS, Tiongkok, India, Jepang, dan Australia merupakan aktor-aktor sentral yang memiliki konsepsi dan gagasan secara khusus terhadap Indo-Pasifik (Heiduk & Wacker, 2020). Masing-masing negara memiliki gagasan dan kepentingan yang berbeda-beda, yang mana secara kolektif menjadi penentu kiblat politik, ekonomi, dan keamanan di Indo-Pasifik. AS melalui kepemimpinan Presiden Donald Trump pertama kali mengemukakan gagasan *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) pada *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) Summit 2017 di Hanoi, Vietnam (Tomotaka, 2021). Dalam kancah internasional, konsep *free* atau bebas dalam FOIP melambangkan kebebasan setiap negara untuk melaksanakan hak kedaulatan tanpa campur tangan negara lain. Dalam kancah nasional, hal ini dimaksudkan dengan kebebasan hak asasi manusia dan perlindungannya dalam pemerintahan. Konsep *open* atau terbuka melambangkan akses yang terbuka terhadap perairan internasional, wilayah udara dan akses terbuka terhadap pasar dalam perdagangan yang adil.

AS secara tegas meyakini bahwa Tiongkok merupakan rival yang harus dihadapi dengan strategi dan diplomasi yang tepat. Modernisasi militer AS menitikberatkan kesiapsiagaan dalam menjamin pengaruh AS secara jangka panjang di Indo-Pasifik. AS berasumsi bahwa di masa depan, konflik dan peperangan akan mengandalkan kekuatan yang kompetitif untuk memperluas pengaruh di wilayah Indo-

Pasifik. AS juga mengusung strategi kemitraan bersama Singapura, Taiwan, Selandia Baru, dan Mongolia (Heiduk & Wacker, 2020). Di sisi lain, AS juga mempererat hubungan kemiliteran dengan India guna mengintensifkan kerja sama dengan Sri Lanka, Maladewa, Bangladesh, dan Nepal.

Usaha AS mengajak negara-negara dengan kekuatan ekonomi dan militer yang potensial nyatanya tidak semulus ego ‘Amerika yang Utama’. Pada tahun 2017 hingga 2018, kritik negara-negara Asia Tenggara ditujukan kepada AS dikarenakan pada tahun-tahun itu FOIP secara eksklusif hanya didasarkan pada aliansi bilateral (He & Li, 2020). Menanggapi kritik negara-negara Asia Tenggara, AS kemudian berupaya mengusung tema *promote a networked region* yang melibatkan Indo-Pasifik melalui perluasan komitmen tripartit dan multilateral (Ford, 2020). AS berkomitmen dalam mempromosikan perdagangan bebas, adil, dan timbal balik di kawasan Indo-Pasifik melalui FOIP. Namun, ternyata FOIP turut membawa dampak eksternal akibat prinsip *America First* atau Amerika yang utama.

Prinsip Amerika yang utama dalam konteks politik memperjelas bahwa FOIP merupakan bentuk kekhawatiran AS terhadap inisiasi BRI yang diusung Tiongkok (Grissler & Vargö, 2021). Kritik negara-negara Asia Tenggara terhadap FOIP pada tahun 2017 hingga 2018 ditanggapi melalui perluasan kerja sama sebagai tawaran yang menguntungkan negara-negara kawasan. Pada mulanya, solusi yang ditawarkan oleh AS merupakan hal yang solutif di tengah keresahan negara-negara yang mengkritik, tetapi di tahun 2019 AS justru mengabaikan banyak mitranya di Asia Tenggara dengan hanya mengirimkan penasihat keamanan nasional Amerika ke KTT Asia Timur 2019 di Bangkok, Thailand. KTT EAS 2019 merupakan forum regional yang melibatkan pemimpin negara-negara Asia Timur dan mitra mencapai kesepakatan yang sama. Namun, dengan ketidakhadiran Presiden Donald Trump yang saat itu hanya diwakilkan oleh penasihat keamanan nasional, yang bahkan bukan merupakan anggota kabinet, memunculkan kekecewaan di tengah kritik masa lalu.

Beberapa tahun belakangan tepatnya pada 2020 AS kembali mengusung inisiatif baru *Pacific Pledge* senilai 200 juta USD dengan tujuan melipatgandakan pendanaan pembangunan oleh AS untuk negara-negara Pasifik selama beberapa tahun mendatang (Dupont, 2021). Inisiatif ini juga memungkinkan *United States Agency for International Development* (USAID) untuk meningkatkan partisipasinya di Pasifik Barat. Tak hanya berhenti di situ, AS bersama dengan Australia, Jepang, dan Selandia Baru juga membangun kemitraan dengan Papua Nugini melalui inisiasi *Papua New Guinea Electrification Partnership* (PEP) yang bertujuan meningkatkan ketersediaan listrik secara mendasar. Sejak menjabat pada tahun 2021, Presiden AS Joe Biden menempatkan Indo-Pasifik sebagai prioritas dalam kebijakan luar negeri dengan berfokus pada FOIP (Li, 2023). Presiden Joe Biden tetap melanjutkan dan memperkuat FOIP dengan tujuan menjaga kebebasan navigasi, supremasi hukum, dan hak negara-negara kawasan di Indo-Pasifik. Selain itu, Presiden Joe Biden juga menginisiasi inisiatif *Build Back Better World* (B3W) melalui tawaran alternatif bagi proyek infrastruktur BRI yang diinisiasi Tiongkok (Zhao, 2021).

C. Interpretasi Jepang tentang Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka

Sebenarnya istilah FOIP lebih dulu muncul dalam pidato yang berjudul *Confluence of the Two Seas* oleh Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe pada 2007. Pada saat itu, PM Shinzo Abe menyampaikan visinya terkait hubungan politik-ekonomi yang lebih hangat antara Pasifik dan Samudra Hindia (Wallis et al., 2020). Berdasarkan pidatonya, PM Shinzo Abe mengemukakan pentingnya keamanan jalur pelayaran sebagai arus bebas manusia, barang, modal, dan pengetahuan (Heiduk & Wacker, 2020). Secara diplomasi, Jepang juga menekankan norma universal untuk menghubungkan negara-negara kawasan secara erat dalam hal politik dan ekonomi. Di tahun yang bersamaan dengan pidato PM Jepang Shinzo Abe pada 2007 itu juga forum strategis *Quadrilateral Security Dialogue* (Quad) diusungkan.

Quad adalah forum strategis yang dipicu oleh keinginan menghadapi tantangan dan peluang di kawasan Indo-Pasifik (Atif & Akbar, 2021). Lebih khusus, Quad hadir sebagai tanggapan terhadap pengaruh dan aktivitas militer Tiongkok di Indo-Pasifik (Koga, 2020). Meskipun pada 2007 forum ini sempat tidak aktif beberapa tahun hingga akhirnya aktif kembali pada 2017, tetapi tujuan diplomasinya tetap tercapai. Quad melibatkan empat negara, yakni AS, Jepang, India, dan Australia. Adapun tiga bidang strategis berdasarkan prinsip-prinsip FOIP, yakni pertama, menjaga ketertiban berdasarkan peraturan dengan menjunjung tinggi perdagangan bebas dan kebebasan navigasi; kedua, menjamin kesejahteraan ekonomi melalui konektivitas yang lebih luas melalui infrastruktur, program pertukaran, kelembagaan, dan harmonisasi peraturan global; ketiga, menjaga kedamaian dan keamanan melalui peningkatan kerja sama dengan negara AS, India, Australia, dan mitra lainnya (Heiduk & Wacker, 2020).

Sejak cikal bakal FOIP melalui konsep *Arc of Freedom and Prosperity*, yakni strategi Jepang guna mempererat hubungan dengan negara-negara yang memiliki ekonomi pasar bebas dari Eropa Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, hingga Asia Tenggara diinisiasi oleh PM Shinzo Abe tahun 2006, terjadi banyak dinamika dalam strategi FOIP yang menyebabkan perubahan konsep dan upaya terkait FOIP. Tabel 2.3 berikut menganalisis upaya terkait FOIP oleh PM Jepang sejak tahun 2006 hingga saat ini.

Tabel 2.3 Upaya Jepang Terkait FOIP Tahun 2006–2023

Perdana Menteri/ Periode Jabatan	Upaya terkait FOIP
Shinzo Abe (2006–2007)	Mengusulkan konsep <i>Arc of Freedom and Prosperity</i> yang menjadi cikal bakal FOIP. Meningkatkan kerja sama keamanan dengan AS dan negara-negara Asia Tenggara.
Yasuo Fukuda (2007–2008)	Memperkuat hubungan diplomatik dengan ASEAN melalui kebijakan <i>Fukuda Doctrine</i> , fokus pada kerja sama ekonomi dan budaya, tetapi belum eksplisit dalam FOIP.

Perdana Menteri/ Periode Jabatan	Upaya terkait FOIP
Taro Aso (2008–2009)	Memperkenalkan konsep <i>Asia's Democratic Security Diamond</i> untuk menghubungkan India, Australia, Jepang, dan AS sebagai dasar pembentukan FOIP.
Yukio Hatoyama (2009–2010)	Fokus pada hubungan Jepang-Tiongkok dan pembentukan <i>East Asian Community</i> sehingga keterlibatan dalam FOIP kurang menonjol.
Naoto Kan (2010–2011)	Meningkatkan kerja sama maritim dengan AS dan ASEAN, tetapi lebih berfokus pada respons terhadap krisis domestik (Gempa Tohoku 2011).
Yoshihiko Noda (2011–2012)	Memperkuat aliansi dengan AS dan mendorong kerja sama keamanan di Laut China Timur, tetapi inisiatif terkait FOIP belum eksplisit.
Shinzo Abe (2012–2020)	Mengartikulasikan dan mempromosikan secara penuh konsep FOIP sebagai strategi utama Jepang. Menekankan kebebasan navigasi, supremasi hukum, dan pembangunan ekonomi di Indo-Pasifik.
Yoshihide Suga (2020–2021)	Melanjutkan kebijakan FOIP Shinzo Abe, fokus pada penguatan aliansi AS-Jepang dan kerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk menghadapi pengaruh Tiongkok.
Fumio Kishida (2021–2023)	Meneruskan FOIP dengan penekanan pada keterlibatan multilateral, kerja sama ekonomi, dan penguatan pertahanan maritim. Mendorong stabilitas regional melalui diplomasi aktif.

Sumber: Koga (2021)

Sejak tahun 2006, Jepang telah mengambil peranan penting dalam membentuk dan mendiplomasikan FOIP. Melalui inisiasi PM Shinzo Abe, Jepang memperkenalkan konsep *Arc of Freedom and Prosperity*, yang menjadi landasan bagi FOIP, dengan fokus pada promosi demokrasi, supremasi hukum, dan kerja sama ekonomi di kawasan yang membentang dari Asia Timur hingga Afrika (Koga, 2021). Pada periode 2012–2020, PM Shinzo Abe memperkuat konsep FOIP dengan menginisiasi strategi yang lebih komprehensif. Jepang aktif memperkuat aliansi dengan AS dan negara-negara, seperti India

dan Australia melalui *Quadrilateral Security Dialogue* (Quad), guna menghadapi tantangan keamanan yang meningkat dari Tiongkok, terutama di LCS dan Laut China Timur. Setelah Abe, PM Yoshihide Suga dan Fumio Kishida melanjutkan upaya ini. Suga fokus pada penguatan hubungan dengan ASEAN dan memperkuat kerja sama keamanan maritim. Kishida, yang menjabat sejak 2021, menekankan diplomasi multilateral dan pembangunan infrastruktur berkualitas tinggi di Indo-Pasifik melalui inisiatif seperti *Partnership for Quality Infrastructure*.

Secara keseluruhan, Jepang terus berkomitmen pada FOIP dengan tujuan menjaga stabilitas regional, mempromosikan tatanan berbasis aturan, dan menawarkan alternatif pembangunan bagi negara-negara berkembang di kawasan Indo-Pasifik, menghadapi pengaruh Tiongkok yang semakin besar. Pada tahun 2018, strategi FOIP berganti nama menjadi *FOIP Vision* (Koga, 2020). Dengan demikian, Jepang tidak lagi berbicara tentang strategi melainkan sebuah visi, yang mulanya BRI Tiongkok dianggap sebagai proyek yang harus dibendung kini menjadi hidup berdampingan dan saling melengkapi. Pada saat yang sama, promosi tentang demokrasi sebagai elemen normatif FOIP telah berkurang dan Jepang tidak lagi membendung Tiongkok (Radjendra et al., 2022). Masih di tahun 2018, Jepang memainkan peran penting dalam *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP), yaitu sebuah perjanjian perdagangan bebas antara Jepang dengan Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam. Adapun yang menjadi dasar bagi Jepang untuk bergabung dalam CPTPP, yakni untuk memperluas akses pasar, meningkatkan standar perdagangan internasional, dan menjadi pemimpin tatanan ekonomi berbasis aturan di Indo-Pasifik (Bobowski et al., 2021).

CPTPP merupakan reformulasi dari *Trans-Pacific Partnership* (TPP) setelah AS menarik diri pada 2017 (Salamatov & Galkina, 2019). CPTPP memiliki visi dalam mengurangi atau menghilangkan tarif dan hambatan perdagangan antaranggota; mendorong investasi dan memberikan proteksi serta jaminan hukum kepada investor;

menetapkan standar perlindungan tenaga kerja; dan meningkatkan transparansi serta efisiensi regulasi perdagangan bebas. Perubahan konsep FOIP dari strategi menjadi visi seiring dengan fokus Jepang terhadap proyek infrastruktur, kebijakan perdagangan, serta kerja sama pembangunan menjadikan FOIP sebagai alternatif terhadap BRI Tiongkok. Pada akhirnya, seiring dengan pergantian PM Jepang, banyak aspek dari visi FOIP mengalami perubahan prinsip, misalnya kembalinya prinsip kebijakan luar negeri lama, seperti tatanan internasional berbasis aturan dan sentralitas kepentingan Jepang.

D. Australia dan Kerangka Acuan Indo-Pasifik

Australia memiliki peranan strategis dan signifikan terhadap Indo-Pasifik yang menjadi gravitasi geopolitik dan geoekonomi global. Bagi Australia, konsepsi Indo-Pasifik menjadi kerangka acuan regional untuk geostrateginya sejak 2013 (Khurana, 2019). Secara independen, Australia memiliki kekuatan menengah di satu sisi dan di sisi lain dalam hal dependensi Australia merupakan sekutu yang bergantung pada AS (Koga, 2020). Dalam geostrategi, Australia berada di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik, yang menjadikan Australia sebagai kawasan interaksi antarnegara Indo-Pasifik. Australia memainkan peranan penting dalam keamanan dan stabilitas di Indo-Pasifik. Angkatan bersenjata Australia (*Australia Dence Force*) secara simultan terlibat dalam latihan militer gabungan dengan negara-negara kuat lainnya, seperti AS, Jepang, dan India. Latihan militer *Talisman Sabre* (TS) merupakan latihan gabungan utama angkatan bersenjata Australia dan AS (Christie et al., 2023). Latihan ini merupakan latihan militer terbesar di Indo-Pasifik yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali di wilayah Australia.

Bagi Australia, kehadiran AS dan kerja sama bilateral yang dibangun merupakan penstabil kawasan Indo-Pasifik. Bahkan dalam pidato Menteri Pertahanan Australia Linda Reynolds pada Dialog Shangri-La 2019 di Singapore menyatakan bahwa Tiongkok harus lebih banyak berkontribusi dalam perdamaian dan stabilitas Indo-Pasifik sebagai bentuk tanggung jawab (Heiduk & Wacker, 2020).

Australia sebagai negara yang terletak di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik memiliki diplomasi khusus terkait Indo-Pasifik. Tabel 2.4 berikut menganalisis kebijakan terkait Indo-Pasifik oleh Australia sejak 2007 hingga saat ini.

Tabel 2.4 Kebijakan Australia Terkait Indo-Pasifik

Perdana Menteri/Priode Jabatan	Kebijakan Terkait FOIP
Kevin Rudd (2007–2010)	Fokus pada diplomasi multilateral dan penguatan hubungan dengan negara-negara Asia, termasuk meningkatkan keterlibatan Australia dalam forum regional, seperti ASEAN dan <i>East Asia Summit</i> .
Julia Gillard (2010-2013)	Memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara dan mendukung kebijakan luar negeri berbasis kemitraan untuk mempromosikan stabilitas di kawasan.
Kevin Rudd (2013)	Mengalihkan perhatian dari kebijakan luar negeri yang lebih luas untuk fokus pada keamanan dan diplomasi strategis, termasuk melanjutkan keterlibatan dengan Asia dan Pasifik.
Tony Abbott (2013-2015)	Memperkenalkan kebijakan “ <i>Australia’s Asian Century</i> ” dengan penekanan pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan hubungan bilateral dengan negara-negara Asia, serta fokus pada keamanan maritim.
Malcolm Turnbull (2016–2018)	Meningkatkan kerja sama dengan AS dan negara-negara Indo-Pasifik melalui kebijakan keamanan dan pertahanan yang lebih kuat, serta mendukung kebijakan FOIP untuk menahan pengaruh Tiongkok.
Scott Morrison (2019-2022)	Memperkuat aliansi dengan AS melalui AUKUS dan Quad, serta mengambil sikap tegas terhadap klaim teritorial Tiongkok di LCS. Memprioritaskan keamanan regional dan diversifikasi ekonomi.

Perdana Menteri/Priode Jabatan	Kebijakan Terkait FOIP
Anthony Albanese (2022–2023)	Melanjutkan kebijakan FOIP dan AUKUS, serta meningkatkan diplomasi dengan negara-negara Indo-Pasifik untuk menghadapi tantangan dari Tiongkok. Menekankan pentingnya kerja sama multilateral dan keamanan regional.

Sumber: Varghese (2019); Panda & Ghiasy (2024)

Berdasarkan geoekonomi, sebagai negara dengan ekonomi terbuka Australia bergantung pada perdagangan internasional dan merupakan anggota dari *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) (Salamatov & Galkina, 2019). CPTPP bukan hanya berperan dalam membuka akses pasar yang luas bagi produk dan layanan jasa Australia, tapi juga menetapkan standar yang tinggi dalam perdagangan, investasi, dan hak pekerja. Adapun pertimbangan Australia untuk bergabung dalam CPTPP dikarenakan kesempatan dalam akses pasar yang lebih luas dan mengurangi ketergantungan Australia terhadap Tiongkok sebagai mitra dagang utama, dengan demikian Australia dapat mendiversifikasi ekspor dan investasi (Wilson, 2021).

Australia juga terlibat dalam inisiatif *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) bersama 14 negara Indo-Pasifik lainnya, seperti ASEAN, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan (Al-Qudah et al., 2022). RCEP merupakan perjanjian perdagangan terbesar di dunia dengan estimasi perputaran uang 30% dari PDB Dunia (Liu et al., 2022). Australia melalui keikutsertaannya dalam RCEP menunjukkan komitmen untuk mendukung integrasi ekonomi regional dan mempererat hubungan dagang di Indo-Pasifik. Australia bergabung dalam RCEP bertujuan untuk memperluas akses pasar, mendorong peningkatan kerja sama ekonomi dan mendiversifikasi mitra dagang. Dengan bergabungnya Australia dalam RCEP maka posisi Australia sebagai kekuatan menengah di dunia menjadi lebih kuat karena melawan dominasi Tiongkok dan mendukung kebijakan AS di kawasan (Davis, 2020). Dengan bergabung dalam RCEP, Australia

menegaskan komitmennya terhadap stabilitas dan keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik, serta meningkatkan diplomasi ekonomi di tengah ketegangan global.

Dalam kebijakan luar negeri Australia, kebebasan navigasi pada perairan internasional dan melakukan perdagangan tanpa khawatir terhadap intervensi merupakan prinsip kunci (Wirth, 2019). Dalam konflik LCS, yang mana Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah LCS sebagai teritorialnya membuat Australia bergerak mendukung supremasi hukum internasional dan mendesak penyelesaian sengketa melalui upaya damai. Menanggapi inisiasi BRI Tiongkok, pemerintah Australia menekankan pentingnya transparansi dan tata kelola yang bijaksana dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur untuk mencegah jebakan utang luar negeri negara-negara kawasan. Australia menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan perannya di Indo-Pasifik terkhusus dalam kerja sama multilateral melalui organisasi ASEAN dan APEC (He & Feng, 2020).

Kerja sama multilateral dalam infrastruktur antara Australia dengan AS dan Jepang menekankan kualitas standar emas global (Heiduk & Wacker, 2020). Berbeda dengan BRI Tiongkok yang penuh kritik akibat dari mendorong negara-negara di kawasan untuk terjebak dalam perangkap utang, proyek infrastruktur Australia, AS, dan Jepang di Indo-Pasifik menekankan transparansi, keberlanjutan dan keterlibatan sektor swasta dengan penghindaran utang (Vashisht, 2023). Dalam diplomasinya terhadap Indo-Pasifik, Australia bertujuan mempertahankan tatanan berbasis aturan yang memberikan perdamaian abadi bagi negara-negara kawasan dengan menghormati hak-hak negara kawasan dan mengedepankan perdamaian.

E. India: Kebijakan Bertindak ke Timur

Dalam menghadapi dinamika geopolitik dan geoekonomi di Indo-Pasifik, India mengembangkan beberapa kebijakan strategis dalam merespons tantangan dan peluang yang mungkin terjadi. PM Narasimha Rao pada tahun 1991 pertama kali memperkenalkan *Look East Policy* yang bertujuan mempererat hubungan ekonomi dan

posisi strategis India dengan negara-negara Asia Timur dan Tenggara (Kelly, 2014). Kebijakan ini lahir dari kebutuhan India untuk mencari mitra ekonomi baru di tengah krisis ekonomi global dan mengurangi ketergantungan India pada negara barat. Selanjutnya pada tahun 2014 oleh PM Nerendra Modi, kebijakan *Look East* berevolusi menjadi *Act East Policy* yang menekankan fokus pada aspek keamanan dan konektivitas (Khatik & Bhandari, 2021). Kebijakan bertindak ke Timur (*Act East Policy*) merupakan inisiatif kebijakan luar negeri India dengan visi mempererat hubungan ekonomi, strategis, dan budaya dengan negara-negara kawasan Indo-Pasifik. Adapun fokus dari kebijakan bertindak ke Timur menyasar pada negara-negara ASEAN dan Asia Timur. Fondasi tradisional kebijakan luar negeri India berperan penting dalam penafsiran konsep Indo-Pasifik (Kesavan et al., 2020).

Tidak hanya berhenti pada *Act East Policy*, pada tahun 2015 PM Nerendra Modi juga melahirkan kebijakan *Security and Growth for All in the Region* (SAGAR) dengan komitmen terhadap keamanan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Samudra Hindia dan Indo-Pasifik yang lebih luas. SAGAR turut mendorong India lebih proaktif dalam kerja sama keamanan maritim dengan negara-negara kawasan. Evolusi kebijakan India dari *Look East* ke *Act East* hingga SAGAR merupakan respons terhadap dinamika regional dan pengaruh Tiongkok yang dominan di Indo-Pasifik. India memandang Tiongkok sebagai kekuatan pendorong sesungguhnya dalam konsepsi Indo-Pasifik melalui tiga alasan, yakni India memandang kebijakan Tiongkok sebagai pengepungan strategis; India prihatin terhadap kebebasan navigasi di LCS; dan India khawatir dengan kehadiran militer Tiongkok di Samudra Hindia (Heiduk & Wacker, 2020).

Geoekonomi merupakan salah satu dimensi utama pengaruh India di Indo-Pasifik. India berusaha meningkatkan investasi dan kegiatan perdagangan dengan negara-negara kawasan melalui Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement* - FTA). Melalui FTA India berusaha memperkuat posisinya dalam rantai nilai global dan regional serta menempatkan daya saing ekonominya di posisi strategis (Kumarasamy, 2023). Dalam hal pertahanan, India

juga merapatkan barisan dengan AS, Australia, dan Jepang dalam keamanan dan militer. Latihan militer Malabar merupakan latihan militer angkatan laut tahunan yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan koordinasi dan inter-operabilitas dalam rangka menjaga keamanan perairan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik (Hanif & Sharif, 2021). India di bawah pemerintahan PM Narendra Modi dalam keterlibatannya di *circle* internasional mengambil langkah yang lebih tegas terhadap kebijakan ekspansif Tiongkok di Indo-Pasifik. Berbeda dengan kepemimpinan Manmohan Singh yang hanya menjaga keseimbangan kerja sama dan kompetisi dengan Tiongkok. Tabel 2.5 berikut menganalisis perbedaan kebijakan PM Manmohan Singh dan PM Narendra Modi dalam kebijakan terkait Indo-Pasifik.

Tabel 2.5 Kebijakan PM Manmohan Singh dan PM Narendra Modi Terkait Indo-Pasifik

Kebijakan	Manmohan Singh (2004–2014)	Narendra Modi (2014–2023)
Visi Strategis	Memperkuat hubungan ekonomi dan keamanan dengan Asia Timur dan Asia Tenggara melalui kebijakan <i>Look East Policy</i> (LEP).	Perluasan dari LEP menjadi <i>Act East Policy</i> (AEP), dengan fokus pada tindakan konkret dan kerja sama yang lebih aktif di kawasan Indo-Pasifik.
Pendekatan Diplomatik	Diplomasi ekonomi dan politik untuk mengintegrasikan India dengan ekonomi Asia Timur. Menjaga hubungan baik dengan ASEAN sebagai mitra strategis.	Pendekatan diplomatik yang lebih proaktif dan inklusif melalui <i>Security and Growth for All in the Region</i> (SAGAR). Menguatkan hubungan dengan negara-negara kunci, seperti Jepang, Australia, dan AS melalui Quad.

Kebijakan	Manmohan Singh (2004–2014)	Narendra Modi (2014–2023)
Kerja sama Keamanan	Fokus pada kerja sama keamanan maritim secara terbatas di Samudra Hindia dan Asia Tenggara. Penekanan pada <i>Malabar Exercises</i> dengan AS.	Memperluas kerja sama keamanan maritim di seluruh Indo-Pasifik. Meningkatkan partisipasi India dalam Quad dan memperkuat kerja sama pertahanan dengan negara-negara anggota Quad.
Kebijakan Maritim	Fokus pada penguatan kapabilitas maritim di Samudra Hindia. Penekanan pada perlindungan jalur perdagangan maritim.	Mengembangkan kebijakan maritim yang lebih luas dengan SAGAR, yang menekankan pada keamanan, kerja sama, dan pembangunan ekonomi di Indo-Pasifik.
Pandangan terhadap Tiongkok	Berusaha menyeimbangkan hubungan dengan Tiongkok sambil meningkatkan kehadiran India di Asia Timur. Menjaga keseimbangan antara kerja sama dan kompetisi dengan Tiongkok.	Sikap yang lebih tegas terhadap kebijakan ekspansif Tiongkok di Indo-Pasifik. Meningkatkan kemitraan strategis dengan negara-negara yang memiliki pandangan serupa untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok.

Sumber: Kumar et al. (2020); Gupta (2020)

Keterlibatan India di tengah dinamika Indo-Pasifik tentu tidak serta merta menggeser tatanan dan pengaruh besar Tiongkok dengan mudah, India juga menghadapi tantangan internal, seperti pembangunan infrastruktur dan birokrasi negara yang mana masih dianggap lebih utama untuk ditanggapi sebelum terlibat dalam aspek Indo-Pasifik yang lebih luas. Untuk mengatasi hambatan ini, India perlu melakukan reformasi ekonomi dan birokrasi yang signifikan demi menciptakan lingkungan bisnis yang menjanjikan. Meskipun demikian, keunggulan India dalam hal demografi dianggap sesuatu yang menguntungkan sebagai sumber daya manusia produktif dan

dapat berpengaruh secara nyata dalam memperkuat ketahanan Indo-Pasifik. Kemajuan teknologi dan inovasi di India yang telah mengubah kekuatan dunia dari barat ke timur juga merupakan aspek pendukung daya saing ekonomi kawasan Indo-Pasifik.

F. Sudut Pandang Negara-Negara ASEAN terhadap Indo-Pasifik

Dalam revolusi pergeseran terminologi “Asia Pasifik” menjadi “Indo-Pasifik”, dialog tentang kebangkitan kekuatan ekonomi membawa signifikansi konseptual dan substansial di kalangan negara-negara kawasan. Samudra Hindia dan Pasifik yang tidak dapat dipisahkan sebagai jalur utama transportasi dan perdagangan internasional semakin menarik dalam diskusi-diskusi internasional. Kemunculan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Samudra Hindia yang dibersamai dengan ancaman keamanan regional memaksa negara-negara kawasan Asia Timur memberikan perhatian yang lebih aktif (Anwar, 2023). Persaingan antara AS dan Tiongkok dalam perang dagang dan kekuatan militer turut memengaruhi kekhawatiran negara-negara ASEAN (Khurana, 2019). Kebijakan luar negeri Tiongkok yang ekspansif dan visioner terhadap inisiatif BRI dianggap sebagai ancaman oleh negara-negara rival. Kebangkitan Quad pada 2017 setelah bertahun-tahun lamanya non-aktif secara tegas berupaya memastikan Indo-Pasifik berada dalam situasi bebas dan terbuka berdasarkan supremasi hukum.

Negara-negara ASEAN yang terdiri atas Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste dalam rangka mempertahankan otonomi regional di Asia Tenggara memilih bekerja sama dengan AS dan Tiongkok dengan mempertimbangkan keuntungan yang ditawarkan oleh dua negara adikuasa tanpa memilih keberpihakan secara khusus. ASEAN telah sejak lama mengambil peran proaktif dalam arsitektur regional yang lebih inklusif di kawasan Indo-Pasifik (Anwar, 2023).

Negara-negara ASEAN sepakat untuk berpartisipasi dalam langkah-langkah yang membangun kepercayaan, diplomasi preventif dan keamanan kooperatif dalam upaya membangun hubungan yang saling menguntungkan (Purwanto, 2024). Meskipun negara-negara ASEAN bukan merupakan aktor sentral dalam Indo-Pasifik, seperti Tiongkok, AS, Jepang, India, dan Australia, tetapi negara-negara ASEAN memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap Indo-Pasifik. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara berusaha menjaga hubungan baik dengan AS dan Tiongkok tanpa menunjukkan keberpihakan secara khusus, berbeda dengan Singapura yang merupakan mitra strategis AS dalam kegiatan ekonomi. Perbedaan pandangan negara-negara ASEAN tersebut dianalisis dalam Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Sudut Pandang Negara-Negara ASEAN terhadap Indo-Pasifik

Negara	Sudut Pandang terhadap Indo-Pasifik	Kebijakan Terkait	Hubungan dengan AS dan Tiongkok
Indonesia	Pendukung kuat konsep ASEAN <i>Outlook on the Indo-Pacific</i> (AOIP) yang menekankan inklusivitas dan kerja sama.	AOIP <i>Global Maritime Fulcrum</i> (GMF)	Hubungan baik dengan semua negara utama, termasuk Tiongkok, AS, dan India.
Malaysia	Mendukung pendekatan inklusif, menolak blok militer eksklusif di kawasan Indo-Pasifik.	AOIP <i>Non-Alignment Policy</i>	Menjaga keseimbangan antara Tiongkok dan AS, berhati-hati dalam keterlibatan dengan Quad.
Singapura	Mendorong keterlibatan multilateral dan menekankan pentingnya kebebasan navigasi serta perdagangan bebas.	AOIP <i>Rules-Based Order</i>	Mitra strategis AS, bekerja sama erat dengan Tiongkok, dan mendukung Quad sebagai forum dialog.

Negara	Sudut Pandang terhadap Indo-Pasifik	Kebijakan Terkait	Hubungan dengan AS dan Tiongkok
Vietnam	Kuat dalam menolak ekspansionisme Tiongkok di LCS, mendukung kehadiran AS di kawasan.	AOIP <i>National Defense Policy</i>	Hubungan erat dengan AS dan India, serta skeptis terhadap Tiongkok.
Thailand	Memprioritaskan keseimbangan antara kekuatan besar, mendukung keterlibatan ASEAN di Indo-Pasifik.	AOIP <i>Balanced Diplomacy</i>	Hubungan baik dengan Tiongkok dan AS, tetapi lebih condong ke arah non-konfrontasi.
Filipina	Awalnya mendukung kehadiran AS untuk melawan Tiongkok di LCS, tetapi belakangan mengambil pendekatan yang lebih moderat.	AOIP <i>Mutual Defense Treaty dengan AS</i>	Hubungan yang fluktuatif dengan Tiongkok, menjaga kemitraan pertahanan dengan AS.
Myanmar	Kurang terlibat secara aktif di Indo-Pasifik, lebih fokus pada isu domestik dan hubungan bilateral dengan negara-negara besar.	AOIP (dalam lingkup terbatas)	Hubungan erat dengan Tiongkok, tetapi juga membuka hubungan dengan India dan AS.
Laos	Fokus pada pembangunan ekonomi domestik, mendukung keterlibatan ASEAN dalam Indo-Pasifik, tetapi dengan profil rendah.	AOIP (dukungan normatif)	Hubungan sangat erat dengan Tiongkok, tergantung pada bantuan ekonomi dan investasi.
Kamboja	Sikap yang lebih pro-Tiongkok, cenderung mendukung kebijakan Tiongkok di Indo-Pasifik dan sering mengambil sikap yang sejalan dengan Beijing.	AOIP (dukungan terbatas)	Hubungan sangat erat dengan Tiongkok, terutama dalam hal ekonomi dan infrastruktur.

Negara	Sudut Pandang terhadap Indo-Pasifik	Kebijakan Terkait	Hubungan dengan AS dan Tiongkok
Brunei Darus-salam	Mempromosikan stabilitas regional dan kebebasan navigasi, dengan pendekatan netral dan tidak konfrontatif.	AOIP <i>Peaceful Resolution Policy</i>	Hubungan baik dengan Tiongkok, AS, dan negara-negara ASEAN, menjaga sikap netral.

Sumber: Oktaviano et al. (2020); Anwar (2023); Heiduk (2020)

Indonesia sebagai negara dengan luas wilayah terbesar dan jumlah penduduk terbanyak di ASEAN mengambil peran sentral dalam mendorong ASEAN berperan aktif dalam wacana konsep strategis Indo-Pasifik (Anwar, 2023). Asia Tenggara yang terletak di titik tengah dalam geostrategi Samudra Hindia dan Pasifik harus mempertahankan sentralitasnya dalam pembangunan Indo-Pasifik yang terus dikembangkan. Indonesia memandang bahwa sentralitas ASEAN merupakan fokus penting dalam memastikan pembangunan arsitektur regional Indo-Pasifik yang terbuka, transparan, dan inklusif (Siahaan & Risman, 2020). Presiden Indonesia Joko Widodo dalam pertemuan *East Asia Summit* 2014 di Myanmar pertama kali mengemukakan konsep PMD. Indonesia sebagai PMD menggambarkan visi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekuatan maritim yang potensial dalam pembangunan ekonomi yang merata (Rachman, 2022).

Dalam dinamika yang terjadi di Indo-Pasifik, meskipun ASEAN bukan aktor sentral yang secara khusus memiliki kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan Indo-Pasifik, tetapi ASEAN merupakan faktor penentu bagi negara-negara kecil di kawasan Indo-Pasifik untuk mendukung pembangunan kawasan (Anwar, 2023). Faktor penentu bagi negara-negara ASEAN untuk mendukung inisiatif dan strategi aktor-aktor sentral dalam pembangunan Indo-Pasifik adalah apakah ASEAN dapat mempertahankan dan menjalankan sentralitasnya dalam dinamika global (Siahaan & Risman, 2020). Sentralitas ASEAN dalam hubungan internasional merupakan tujuan yang termuat dalam

Pasal 1 Piagam ASEAN, yakni: “Mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam hubungan dan kerja samanya dengan para mitra eksternal dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif.” ASEAN harus terus berupaya mempertahankan sentralitasnya dengan harapan Indo-Pasifik menjadi kawasan terintegrasi dan saling terhubung dengan ASEAN. Meskipun ASEAN harus mempertahankan sentralitasnya, tetapi ASEAN memiliki berbagai upaya dan gagasan mendukung kemajuan Indo-Pasifik (Siahaan & Risman, 2020). Tabel 2.7 berikut mendeskripsikan gagasan ASEAN dalam mendukung kemajuan Indo-Pasifik.

Tabel 2.7 Gagasan ASEAN Mendukung Kemajuan Indo-Pasifik

Gagasan	Tujuan	Mitra
<i>ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)</i>	Meningkatkan stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik melalui kerja sama multilateral	ASEAN, AS, Tiongkok, Jepang, India
<i>ASEAN Free Trade Area (AFTA)</i>	Meningkatkan perdagangan intra-ASEAN dan daya saing ekonomi kawasan	Negara-negara anggota ASEAN
<i>Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)</i>	Menciptakan pasar terbesar di dunia, meningkatkan perdagangan dan investasi di kawasan Indo-Pasifik	ASEAN, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru
<i>ASEAN Regional Forum (ARF)</i>	Meningkatkan stabilitas dan keamanan di kawasan melalui dialog dan kerja sama	ASEAN, AS, Tiongkok, Jepang, India
<i>ASEAN Maritime Forum (AMF)</i>	Menangani ancaman keamanan maritim dan meningkatkan kerja sama di sektor maritim	Negara-negara anggota ASEAN

Gagasan	Tujuan	Mitra
<i>ASEAN Economic Community (AEC)</i>	Meningkatkan integrasi ekonomi dan memperkuat posisi ASEAN dalam ekonomi global	Negara-negara anggota ASEAN

Sumber: Wilkins (2020)

Negara-negara ASEAN turut berpartisipasi dalam mengembangkan berbagai program dan inisiatif dalam pertumbuhan kawasan Indo-Pasifik. *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) merupakan kebijakan yang diadopsi ASEAN pada KTT ASEAN 2019. AOIP mencerminkan visi ASEAN untuk Indo-Pasifik dengan empat area fokus, meliputi meningkatkan kerja sama maritim untuk keamanan wilayah perairan, pengelolaan SDA di kawasan perairan dan pengembangan infrastruktur perairan; meningkatkan konektivitas untuk mendukung perdagangan, investasi, dan mobilitas manusia; memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan berfokus pada pengurangan kesenjangan; memajukan integrasi ekonomi regional melalui perdagangan bebas, inovasi, dan investasi. Selain AOIP, beberapa program utama dari ASEAN yang turut mendukung kemajuan Indo-Pasifik, antara lain AFTA, RCEP, kerja sama dalam bidang maritim, seperti AMF dan kerja sama dalam menjaga stabilitas kawasan, seperti ARF.

G. Independensi Tiongkok dan Pemicu Konflik di Indo-Pasifik

Indo-Pasifik sebagai kawasan potensial perekonomian dan perdagangan memiliki kepentingan strategis sebagai pusat perhatian global. Kepentingan strategis Indo-Pasifik tidak hanya terbatas pada negara-negara yang berbatasan langsung, tetapi juga melibatkan kekuatan besar, seperti AS, Tiongkok, Jepang, India, dan Australia. Dalam sudut pandang Tiongkok, negara-negara dengan kekuatan besar yang terlibat dalam dinamika Indo-Pasifik merupakan hal umum dalam dinamika yang terjadi (Shicun & Colombage, 2019).

Dalam dinamikanya, kolaborasi dan rivalitas muncul sebagai reaksi dalam interaksi di kawasan Indo-Pasifik (He & Li, 2020). Kolaborasi di Indo-Pasifik terwujud melalui berbagai inisiatif kerja sama multilateral dengan tujuan meningkatkan stabilitas, keamanan, dan kemakmuran (Wilkins, 2020). Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan besar mengadopsi kebijakan luar negeri yang otonom. Hal ini tercermin dalam penolakan Tiongkok terhadap keterikatan pada aliansi militer formal dan pendekatan yang fleksibel dalam diplomasi. Prinsip *non-alignment* yang dipegang teguh Tiongkok memungkinkan Tiongkok bermanuver di antara kekuatan besar dunia lainnya tanpa keterikatan pada satu blok tertentu (Afzal et al., 2023). Keterlibatan Tiongkok dalam berbagai organisasi multilateral, seperti ASEAN, *Shanghai Cooperation Organization (SCO)*, dan BRICS, yang mana Tiongkok memainkan peran signifikan dapat tetap terjadi tanpa kehilangan otonominya. Independensi Tiongkok merupakan prinsip utama dalam menjaga posisi Tiongkok menjadi negara yang 'dibutuhkan' dalam setiap kerja sama (Zou et al., 2020).

Negara-negara dengan kekuatan besar yang biasa disebut sebagai aktor sentral selain Tiongkok di Indo-Pasifik berkolaborasi dalam kerja sama keamanan wilayah, infrastruktur, dan kemanusiaan (Kroenig, 2020). Quad merupakan kekuatan penyeimbang Tiongkok yang mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum (Atif & Akbar, 2021). Dalam dinamika Indo-Pasifik, strategi independensi Tiongkok merupakan langkah guna menghindari intervensi pihak ketiga, yakni AS. Prinsip ini memungkinkan Tiongkok mempertahankan kontrol dalam kegiatan diplomatik dan menjaga kepentingan nasionalnya tanpa tekanan eksternal. Kekuatan militer Tiongkok melalui modernisasi militer yang ekstensif merupakan pilar utama kekuatan Tiongkok (Fravel, 2020). Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (*PLA Navy*) merupakan kekuatan militer paling besar dan paling canggih di dunia. Keberadaan militer Tiongkok di LCS merupakan salah satu manifestasi nyata dari kekuatan Tiongkok (Teixeira, 2021). Meskipun *nine dash line* yang diklaim oleh Tiongkok hingga hari ini menjadi sengketa internasional, tetapi Tiongkok tetap mempertahankan klaimnya melalui kekuatan militer.

Selain kekuatan militer, kekuatan ekonomi Tiongkok merupakan faktor kunci dalam independensi Tiongkok (Fravel, 2020). Melalui inisiatif BRI, Tiongkok berhasil membangun jaringan perdagangan dan infrastruktur yang menghubungkan Asia, Afrika, Eropa, termasuk kawasan Indo-Pasifik. Independensi dan strategi Tiongkok melalui berbagai inisiasi turut menggetarkan AS dan negara dengan kekuatan menengah lainnya dalam dinamika Indo-Pasifik. Adapun faktor utama yang memicu kemunculan rivalitas di kawasan Indo-Pasifik antara AS dengan Tiongkok, yakni persaingan dalam geopolitik dan geoekonomi kedua negara (Charoensri, 2022). AS dan Tiongkok sebagai dua negara adikuasa saling berusaha untuk memperluas pengaruhnya di kawasan. Tiongkok melalui inisiatif BRI berhasil mendorong investasi dan kemajuan infrastruktur di kawasan Indo-Pasifik, mulai dari pelabuhan di Asia Tenggara hingga jalur kereta api di Afrika Timur. Sementara AS melalui strategi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka berupaya membendung pengaruh Tiongkok dengan memperkuat aliansi dan kemitraan dengan negara-negara kawasan maupun negara-negara dengan potensi pertumbuhan yang besar.

Isu rivalitas AS dengan Tiongkok merupakan isu umum yang diketahui oleh setiap negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Reaksi yang muncul terhadap isu rivalitas ini pun beragam, ada negara yang memilih untuk menjadi sekutu salah satu negara, tetapi lebih banyak negara-negara kawasan yang memilih kebijakan luar negeri netral dan tidak memihak hanya pada salah satu negara (Purwanto, 2024). Ketegangan LCS juga turut menjadi pemantik rivalitas AS dengan Tiongkok. Selain kedua negara yang saling berupaya memperluas pengaruhnya dalam hal inovasi dan kebijakan, penyebab lain rivalitas AS dan Tiongkok juga ditengarai oleh kemajuan inovasi dalam teknologi. Rivalitas AS dan Tiongkok dalam bidang teknologi disebabkan oleh pengembangan teknologi 5G, kecerdasan buatan, dan semikonduktor (Kroenig, 2020). Sanksi dan pembatasan oleh AS terhadap perusahaan pengembang teknologi Tiongkok, seperti Huawei dan Tiktok memicu kekhawatiran terhadap dominasi teknologi di kawasan. Melalui inisiatif “Made in China 2025” Tiongkok berupaya

membalas sikap AS dan mengurangi ketergantungan pada Barat (Rashidin & Javed, 2020).

Meskipun konflik rivalitas AS-Tiongkok menjadi isu umum bagi negara-negara kawasan Indo-Pasifik, tetapi dalam dinamikanya muncul juga upaya untuk menjembatani konflik dan menemukan jalan tengah bagi kedua negara. Dalam upaya menemukan jalan tengah bagi kedua negara maka diskusi-diskusi yang diwadahi oleh PBB menjadi penampung aspirasi kedua negara dalam rangka keamanan dunia. Grup Dua Puluh (G20) yang terdiri dari 19 negara maju dan berkembang serta Uni Eropa memainkan peran penting dalam dinamika global dan keterkaitannya dengan rivalitas AS dan Tiongkok. G20 merupakan momentum sekaligus forum utama bagi dua kekuatan besar untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan berkolaborasi dalam isu-isu global. Selain melalui upaya mempertemukan kedua belah negara dalam satu forum internasional, upaya mendamaikan dua negara juga didukung oleh negara-negara kawasan, misalnya Indonesia, Singapura, dan Vietnam tetap berupaya meningkatkan kerja sama dan investasi dengan Tiongkok sambil tetap mempertahankan hubungan strategis dengan AS. Pendekatan ini memungkinkan negara-negara kawasan untuk memperoleh manfaat dari kedua negara adikuasa tanpa memiliki ketergantungan tunggal hanya pada satu kekuatan besar.

H. Penutup

Meskipun dalam dinamika Indo-Pasifik Tiongkok berdiri secara independen dengan kekuatan besarnya tanpa bergantung pada kekuatan lain, tetapi Tiongkok terus berupaya mempertahankan pengaruhnya di tengah kolaborasi AS dengan aktor-aktor pendukung. AS memainkan peran strategis dalam rivalitas AS-Tiongkok di Indo-Pasifik melalui FOIP yang menekankan kekuatan aliansi dengan negara-negara berkekuatan menengah, seperti Jepang, India, dan Australia. Melalui kehadiran militernya di LCS, AS bertujuan menyeimbangkan kekuatan dan pengaruh dominan Tiongkok di Indo-Pasifik. Selain meluncurkan aksi melalui kekuatan militer, AS

juga melakukan pertahanan dan perlawanan dalam perang dagang dengan asas kebebasan navigasi bagi negara-negara kawasan tanpa intervensi Tiongkok.

Jepang sebagai aktor pendukung AS berperan sebagai sekutu kunci bagi AS dalam rivalitasnya dengan Tiongkok. Jepang berupaya memperkuat aliansi militer dengan AS melalui kerja sama dan partisipasi dalam latihan militer Quad bersama dengan India dan Australia. Jepang juga berperan menawarkan bantuan pembangunan infrastruktur dan investasi bagi negara-negara kawasan Indo-Pasifik sebagai alternatif BRI yang diinisiasi Tiongkok. Jepang sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia terlibat sebagai pendukung AS melalui kerja sama militer dan ekonomi dalam kapasitas memperkuat pertahanan.

Berbeda dengan Jepang, India melalui *Act East Policy* dan SAGAR berfokus pada penguatan kerja sama maritim, infrastruktur, dan diplomasi *soft power* di kawasan. Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, India mendukung rivalitas kedua negara dikarenakan persaingan yang kompleks dengan Tiongkok. Perbatasan Himalaya antara India dengan Tiongkok yang sering kali terjadi ketegangan militer kedua negara, diperburuk dengan persaingan inovasi teknologi turut menjadi penyebab India menjadi sekutu AS.

Sementara Australia dalam posisi dilematik antara ketergantungan perdagangan dengan Tiongkok dan kebutuhan menjaga aliansi strategis dengan AS berperan mengikuti arus dalam keterikatannya dengan Quad. Australia di satu sisi masih menjaga hubungan Tiongkok dalam perdagangan, tetapi di sisi lain berupaya menyeimbangkan kekuatan bersama dengan AS di Indo-Pasifik. Bersama dengan AS, Australia memegang teguh konsistensi dalam mempertahankan tatanan internasional berlandaskan keadilan dan keamanan regional tanpa intervensi dari Tiongkok. Melalui diplomasi multilateral bersama negara-negara kawasan, Australia memastikan stabilitas Indo-Pasifik terjadi di tengah menguatnya ketegangan AS-Tiongkok.

Rivalitas AS dan Tiongkok menjadi dinamika paling dominan dalam kajian hubungan internasional di era modern. Kedua kekuatan

besar dunia saling bersaing dalam geostrategi dan geopolitik. Rivalitas dua kekuatan besar dunia ini bukan hanya berpengaruh terhadap gejolak ekonomi maupun politik kedua negara secara langsung, tetapi juga berdampak pada tatanan global khususnya kawasan Indo-Pasifik melalui efek *multiplier* di berbagai aspek. Dalam aspek ekonomi, rivalitas AS dan Tiongkok menumbuhkan investasi dan diversifikasi pasar internasional, meskipun efek *multiplier* yang muncul adalah ketidakstabilan perdagangan internasional dan dependensi pembiayaan pembangunan terhadap investor bagi negara-negara kawasan. Dalam aspek politik, negara-negara kawasan memperoleh dorongan kerja sama regional yang lebih luas, tetapi memunculkan efek *multiplier* dalam intervensi eksternal. Sementara itu, dalam aspek keamanan dan militer, rivalitas kedua negara memperkuat kapabilitas kekuatan pertahanan melalui latihan bersama beberapa negara, tetapi juga meningkatkan risiko konflik.

Rivalitas melalui perang dagang antara AS dan Tiongkok yang dimulai sejak 2018 turut membawa pengaruh signifikan terhadap ketidakpastian ekonomi negara-negara kawasan. Kebijakan AS yang menetapkan tarif tinggi terhadap barang-barang impor Tiongkok dibalas dengan kebijakan serupa oleh Tiongkok terhadap AS. Akibatnya, ketidakseimbangan mengguncang rantai pasok global, meningkatnya biaya produksi di tiap-tiap negara dan ketidakpastian pasar. Perusahaan multinasional di negara-negara kawasan Indo-Pasifik turut menjadi korban atas perang dagang yang mengakibatkan perusahaan harus mencari alternatif bahan baku produksi. Dampak agregat dari rivalitas dan perang dagang AS-Tiongkok terhadap negara-negara kawasan menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara-negara kawasan melambat dan menurunkan produktivitas.

Rivalitas AS dan Tiongkok bukan hanya terjadi dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang politik khususnya dalam persaingan kekuatan militer. AS dalam rangka menjadi penyeimbang kekuatan militer Tiongkok yang mendominasi di kawasan Indo-Pasifik terus mengalokasikan pendanaan yang besar untuk mempertahankan kekuatan militernya, sedangkan Tiongkok

semakin memperkuat kekuatan militer melalui modernisasi militer dengan melibatkan kecanggihan teknologi sebagai kekuatan utama. Klaim LCS oleh Tiongkok dan penolakan AS bersama negara-negara kawasan berperairan sama turut menambah dinamika ketegangan di Indo-Pasifik. Inisiasi Tiongkok melalui BRI sebagai upaya meningkatkan pengaruh ekonomi di Indo-Pasifik melalui investasi dan pembangunan infrastruktur merupakan upaya strategis untuk mengikat negara-negara kawasan dalam kerja sama pembangunan meskipun tanpa strategi menggabungkan kekuatan bersama sekutu, seperti AS. Meskipun banyak negara terlibat dalam kesepakatan inisiasi BRI Tiongkok, tetapi AS tidak menghentikan upayanya untuk tetap berpengaruh di Indo-Pasifik. Dalam merespons keterlibatan negara-negara kawasan terhadap BRI Tiongkok, AS menyeimbangkan strategi melalui gagasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dengan berfokus pada transparansi, supremasi hukum, dan pembangunan berkelanjutan.

Jika negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia memilih keberpihakan secara spesifik terhadap rivalitas AS dan Tiongkok, berbeda halnya dengan negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN, meskipun beberapa di antaranya terlibat secara langsung dengan Tiongkok melalui konflik LCS, tetapi negara-negara ASEAN tidak menyatakan keberpihakan secara khusus terhadap AS dalam ketegangan dengan Tiongkok. Negara-negara ASEAN memilih jalur tengah untuk tetap bekerja sama tanpa dominasi khusus terhadap salah satu negara dan memilih untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan kedua negara dalam pertumbuhan ekonomi masing-masing negara ASEAN. Sejauh ini negara-negara ASEAN secara umum masih sangat bergantung terhadap perdagangan dan investasi dari Tiongkok. Hal ini menciptakan situasi bahwa negara-negara ASEAN harus menavigasi dan mempertimbangkan keuntungan ekonomi dari hubungan dengan Tiongkok dan tetap menjaga baik hubungan dengan AS.

Secara keseluruhan, rivalitas AS dengan Tiongkok melibatkan aktor-aktor yang memiliki kepentingannya masing-masing dalam

dinamika Indo-Pasifik. Keterlibatan dalam kolaborasi negara-negara sekutu AS dan independensi Tiongkok mempertahankan pengaruhnya di Indo-Pasifik menambah dinamika yang terjadi terhadap negara-negara kawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. AS dan Tiongkok sebagai dua kekuatan besar dunia melalui dinamika rivalitas yang terjadi hingga saat ini akan menentukan arah dan struktur kebijakan internasional negara-negara kawasan di masa depan.

Referensi

- Afzal, M., Riedel, B., & Sachs, N. (2023). The United States, China and the new “nonaligned” countries. *Brookings Institution Policy Brief*, 1–7.
- Agastia, I. G. B. D., & Perwita, A. A. B. (2016). Indonesia's maritime axis and the security of sea lanes of communications (SLOCs) in the Indo-Pacific. *Jurnal hubungan Internasional*, 5(1), 10–21. doi:10.18196/hi.2016.0081.10-21
- Al-Qudah, A. A., Al-Okaily, M., & Alqudah, H. (2022). The relationship between social entrepreneurship and sustainable development from economic growth perspective: 15 ‘RCEP’ countries. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 12(1), 44–61. doi:10.1080/20430795.2021.1880219
- AMTI. (2022). Maritime claims of the Indo-Pacific. Retrieved from <https://amti.csis.org/maritime-claims-map/>
- Anwar, D. F. (2023). Indonesia's hedging plus policy in the face of China's rise and the US-China rivalry in the Indo-Pacific region. *The Pacific Review*, 36(2), 351–377. doi:10.1080/09512748.2022.2160794
- Atif, M., & Akbar, M. (2021). The belt and road initiative (BRI) vs. quadrilateral security dialogue (the Quad): A Perspective of a Game Theory. *Journal of Development and Social Sciences*, 2(4), 63–75. doi:[http://doi.org/10.47205/jdss.2021\(2-IV\)06](http://doi.org/10.47205/jdss.2021(2-IV)06)
- Bobowski, S., Cvecic, I., & Dobrzanski, P. (2021). *The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)–Genesis and Challenges of The Trans-Pacific Mega-Regionalism in Trade*. Paper presented at the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Cordoba, Spain.

- Charoensri, N. (2022). Changing regional dynamics in the greater mekong subregion: The rivalry between Japan, China and the US and the impacts to regional connectivity. *Thammasat Review*, 25(2), 26–45.
- Christie, E. H., Buts, C., & Du Bois, C. (2023). Demand for military expenditures and security alignment choices in the Indo-Pacific. *Defence and Peace Economics*, 34(5), 581–602. doi:10.1080/10242694.2022.2073430
- Dupont, P. (2021). The United States' Indo-Pacific strategy and a revisionist China: Partnering with Small and Middle Powers in the Pacific Islands Region. *Issues & Insights*, 21(2), 1–40.
- Ford, L. (2020). *The Trump administration and the 'free and open Indo-Pacific'*. Retrieved from Washington DC, USA: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/05/fp_20200505_free_open_indo_pacific.pdf
- Fravel, M. T. (2020). China's "world-class military" ambitions: Origins and implications. *The Washington Quarterly*, 43(1), 85–99. doi:10.1080/0163660X.2020.1735850
- Gale, J. B., & Shearer, A. (2022). Quadrilateral security dialogue and the maritime silk road initiative. *CSIS Brief*, 1–4.
- Grissler, J. R., & Vargö, L. (2021). The BRI vs FOIP: Japan's countering of China's global ambitions. *Institute for Security and Development Policy (ISDP) Issue Brief*, 1–10.
- Gul, S., Umar, S., & Alam, A. (2022). South China Sea: The dispute creates capital. *Global Strategic & Security Studies Review*, 7(4), 24–31. doi:10.31703/gsssr.2022(VII-IV).04
- Gupta, U. (2020). Commitment of India toward the Indo-Pacific region borders. *International Journal for Advance Research in Science and Technology*, 8(4), 219–226.
- Handiriono, R., Hardjowikarto, D., & Maharani, A. (2024). The Nine-Dash Line and Maritime Territorialization: Over the Sovereignty Claims of the Philippines, Indonesia, in the South China Sea under UNCLOS. *Journal of Financial Technology and Business Innovation*, 1(1), 33–40.
- Hanif, S., & Sharif, R. (2021). US-India strategic convergences in the Indo Pacific: Evolving regional dynamics and responses. *Pakistan Journal of American Studies*, 39(2), 25–53.

- He, K., & Feng, H. (2020). The institutionalization of the Indo-Pacific: Problems and prospects. *International Affairs*, 96(1), 149–168. doi:10.1093/ia/iiz194
- He, K., & Li, M. (2020). Understanding the dynamics of the Indo-Pacific: US–China strategic competition, regional actors, and beyond. *International Affairs*, 96(1), 1–7. doi:10.1093/ia/iiz242
- Heiduk, F., & Wacker, G. (2020). From Asia-Pacific to Indo-Pacific: Significance, implementation and challenges. *SWP Research Paper*(9), 1–43. doi:https://doi.org/10.18449/2020RP09
- Hendler, B., & Motta, A. L. C. (2021). Military build-up in Southeast Asia and the South China Sea: How relevant are the disputes with China? *Contexto Internacional*, 43(3), 565–591. doi:https://doi.org/10.1590/S0102-8529.2019430300006
- Jash, A. (2021). The quad factor in the Indo-Pacific and the role of India. *Journal of Indo-Pacific Affairs*, 4(02), 78–85.
- Kelly, A. (2014). Looking back on look east: India's post-cold war shift toward Asia. *Seton Hall Journal of Diplomacy and International Relations*, 15, 81–93.
- Kesavan, K. V., Singh, A., Powell, L., Joshi, M., Mukhopadhyay, A., & Sahoo, N. (2020). India and South Korea: Exploring New Avenues, Outlining Goals. *ORF Special Report*, 1–80.
- Khatik, M. H., & Bhandari, U. (2021). India's foreign policy: A transformation from 'look east' to 'act east' policy. *Towards Excellence*, 13(2), 542–551.
- Khurana, G. S. (2019). The 'Indo-Pacific' idea: Origins, conceptualizations and the way ahead. *Journal of Indian Ocean Rim Studies*, 2(2), 58–76.
- Kim, J., & Druckman, D. (2020). Shelved sovereignty or invalid sovereignty? The South China Sea negotiations, 1992–2016. *The Pacific Review*, 33(1), 32–60. doi:10.1080/09512748.2018.1535520
- Kipgen, N. (2020). India–ASEAN relations: the initiatives, successes, and challenges. *India Review*, 19(3), 207–222. doi:10.1080/14736489.2020.1754012
- Koga, K. (2020). Japan's 'Indo-Pacific' question: Countering China or shaping a new regional order? *International Affairs*, 96(1), 49–73. doi:10.1093/ia/iiz241
- Koga, K. (2021). Japan and the development of quadrilateral cooperation. *Pensamiento Propio*(54), 157–186.

- Kroenig, M. (2020). *The return of great power rivalry: Democracy versus autocracy from the ancient world to the U.S. and China*. Oxford University Press.
- Kumar, S., Verma, S. S., & Shah, S. H. (2020). Indo-US convergence of agenda in the new Indo-Pacific regional security architecture. *South Asia Research*, 40(2), 215–230. doi:10.1177/0262728020915564
- Kumarasamy, D. (2023). Strengthening regional value chain between India and South Korea: Emerging opportunities for trade and investment cooperation. *KIEP Research Paper, World Economy Brief (WEB)*, 23–10. doi:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4417678
- Leddy, K. (2021). Competing claims: The developing roles of international law and unilateral challenges to maritime claims in the South China Sea. *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 54(3), 785–830.
- Li, Z. (2023). Aspiration and leadership research of the diffusion of Indo-Pacific. *SHS Web Conference*, 157(03028), 1–7. doi:https://doi.org/10.1051/shsconf/202315703028
- Liu, Y., Chen, X., & Tian, Y. (2022). Modelling the impact of RCEP agreement on the economic and trade environment of Beijing. *Discrete Dynamics in Nature and Society*, 2022(9237940), 1–7. doi:https://doi.org/10.1155/2022/9237940
- Mearsheimer, J. J. (2022). The Inevitable Rivalry. *Rossiia v globalnoi politike*, 20(1). doi:https://doi.org/10.31278/1810-6439-2022-20-1-166-181
- Mukherjee, R. (2020). Chaos as opportunity: the United States and world order in India's grand strategy. *Contemporary Politics*, 26(4), 420–438. doi:10.1080/13569775.2020.1777040
- Nagy, S. R. (2022). US-China strategic competition and converging middle power cooperation in the Indo-Pacific. *Strategic Analysis*, 46(3), 260–276. doi:10.1080/09700161.2022.2088126
- Napang, M., Patittingi, F., Aspan, Z., Ruslan, A., Latief, B., Hambali, R., & Hendrapati, M. (2019). Contesting views of the Philippines and China over the nine-dash line in the South China Sea. *Journal East Asia and International Law*, 12(1), 180–192. doi:http://dx.doi.org/10.14330/jeail.2019.12.1.10
- Ohnesorge, H. W. (2020). *Soft Power. The forces of attraction in international relations*. Springer.

- Oktaviano, D., Mahroza, J., & Risman, H. (2020). Indonesia defense strategy towards Indo-Pacific (Case Study: The ASEAN outlook on the Indo-Pacific). *International Affairs and Global Strategy*, 80(2020), 21–29. doi:<https://doi.org/10.7176/IAGS/80-04>
- Panda, J., & Ghiasy, R. (2024). Indo-Pacific as a strategic imperative for the EU: Whither Australia? *Policy Brief*, 1–10.
- Pedrasan, R. (2021). *Belt and road initiative. peluang dan tantangan*. Jakad Media Publishing.
- Purwanto, A. J. (2024). The successful of strengthening ASEAN centrality through the ASEAN way. *Journal of Contemporary Sociological Issues*, 4(1), 84–101. doi: <https://doi.org/10.19184/csi.v4i1.45089>
- Rachman, V. H. (2022). Geopolitics: Dynamics and development of Indonesia's Maritime Axis. *Jurnal Ekonomi*, 11(03), 1102–1108.
- Radjendra, P., Wibisono, M., Mahroza, J., & Shabuddin, Z. A. (2022). Indonesia's vision as global maritime fulcrum: A geopolitical strategy to address geopolitical shifts in Indo-Pacific. *Journal of Positive School Psychology*, 8621–8634.
- Rashidin, M. S., & Javed, S. (2020). 'Made in China 2025' strategy and trade hostility: The United States VS China. *Asian Journal of Business Research*, 10(3), 1–23. doi:<https://doi.org/10.14707/ajbr.200088>
- Salamatov, V. Y., & Galkina, N. M. (2019). Comprehensive and progressive agreement for trans-pacific partnership (TPP-11): Past, present and future? *International Trade and Trade Policy*, (1), 5–18. doi:<https://doi.org/10.21686/2410-7395-2019-1-5-18>
- Santoso, S. P. (2021). *Percaturan geopolitik kawasan Laut China Selatan*. Deepublish.
- Shicun, W., & Colombage, J. (2019). *Indo-Pacific strategy and China's response*. Retrieved from Hainan Province, People Republic of China: <https://chinaus-icas.org/wp-content/uploads/2020/11/Indo-Pacific-Strategy-and-Chinas-Response-Report-FINAL.pdf>
- Siahaan, S. Y. E., & Risman, H. (2020). Strengthening ASEAN Centrality within the Indo-Pacific Region. *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, 6(1), 254–266. doi:<https://doi.org/10.20319/pijss.2020.61.254266>

- Sudan, F. K. (2022). Indo-Pacific strategy and India's opportunities and challenges for regional economic cooperation and integration: An Exploratory Review. *Global Economics Science*, 3(2), 143–161. doi:<https://doi.org/10.37256/ges.3220221290>
- Teixeira, V. A. G. (2021). The hegemony's contest in the South China Sea. *Sage Open*, 11(3), 1–15. doi:10.1177/21582440211031216
- Tomotaka, S. (2021). “Belt and Road” vs. “Free and Open Indo-Pacific”: Competition over regional order and ASEAN's responses. *Security & Strategy*, 1, 3–24.
- UN. (1982). *United nations convention on the law of the sea (UNCLOS)*. Retrieved from https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
- Varghese, P. (2019). *The Indo-Pacific and its strategic challenges: An Australian perspective*. ISEAS - Yusof Ishak Institute.
- Vashisht, P. (2023). Indo-Pacific strategies: What do they entail for India? *Journal of Indo-Pacific Affairs*, 6(3), 1–24.
- Wallis, J., Chinoy, S. R., Sambhi, N., & Reeves, J. (2020). A free and open Indo-Pacific: Strengths, weaknesses, and opportunities for engagement. *Asia Policy*, 15(4), 1–6. doi:<https://doi.org/10.1353/asp.2020.0051>
- Wiegand, K. E., & Beuck, E. (2020). Strategic selection: Philippine arbitration in the South China Sea dispute. *Asian Security*, 16(2), 141–156. doi:10.1080/14799855.2018.1540468
- Wilkins, T. S. (2020). Searching for a middle path: ASEAN and the “Indo Pacific”. *Policy Brief*, 1–9.
- Wirth, C. (2019). Whose ‘freedom of navigation’? Australia, China, the United States and the making of order in the ‘Indo-Pacific’. *The Pacific Review*, 32(4), 475–504. doi:10.1080/09512748.2018.1515788
- Wu, X. (2020). Technology, power, and uncontrolled great power strategic competition between China and the United States. *China International Strategy Review*, 2(1), 99–119. doi:10.1007/s42533-020-00040-0
- Yustiningrum, R. R. E., Ramadhan, M. S., Anwar, D. F., Siswanto, Wuryandari, G., Alami, A. N., Prabaningtyas, R. A. R. F., & Elisabeth, A. (2024). *Indo-Pasifik dalam politik luar negeri Indonesia: Dimensi geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi*. Penerbit Andi.
- Zeng, X., & Zhang, S. (2021). From “Asia Pacific” to “Indo Pacific”: The Adjustment of American Asia Pacific strategy from the perspective

- of critical geopolitics. *East Asian Affairs*, 01(02), 2150009-2150001-2150009-2150041. doi:10.1142/s2737557921500091
- Zhang, S. (2022). Rise of China and its behaviours in the South China Sea: an analysis of defensive realism perspective. *Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ)*, 6(1), 286–306. doi:https://doi.org/10.47264/idea.lassij/6.1.18
- Zhao, M. (2021). The belt and road initiative and China–US strategic competition. *China International Strategy Review*, 3(2), 248–260. doi:10.1007/s42533-021-00087-7
- Zhou, X., Cheng, L., Min, K., Zuo, X., Yan, Z., Ruan, X., Cu, S., & Li, M. (2020). A framework for assessing the capability of maritime search and rescue in the south China sea. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 47, 101568. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2020.101568
- Zou, C., Pan, S., & Hao, Q. (2020). On the connotation, challenge and significance of China's "energy independence" strategy. *Petroleum Exploration and Development*, 47(2), 449–462. doi:https://doi.org/10.1016/S1876-3804(20)60062-3